



Daftar Isi

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I LANDASAN KONSEPTUAL PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU	1
A. Pemilu dalam Kerangka Demokrasi Konstitusional	1
B. Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Pemilu	8
1. Pengertian Pemilu	8
2. Fungsi dan Tujuan Pemilu	9
C. Prinsip dan Standar Pemilu Demokratis	11
1. Prinsip Pemilu Demokratis Menurut ODIHR	11
2. Prinsip Pemilu Demokratis Menurut Ramlan Surbakti	14
3. Standar Pemilu Demokratis Menurut International IDEA	15
D. Sistem Keadilan Pemilu	22
E. Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Demokratis	24
1. Hakikat dan Pengertian Sengketa	24
2. Teori-Teori Terjadinya Konflik atau Sengketa	27
3. Sarana Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Demokratis	29

F. Ruang Lingkup dan Fungsi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	33
1. Ruang Lingkup Sengketa Proses Pemilu	33
2. Fungsi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	37
BAB 2 ASAS-ASAS, HUKUM ACARA, DAN DASAR HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU	41
A. Pengertian Asas Hukum	41
B. Asas dan Prinsip Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	45
1. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemilu	45
2. Prinsip-Prinsip Penyelenggara Pemilu	46
3. Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	53
4. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	62
BAB 3 KEWENANGAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU	65
A. Dinamika Posisi, Organisasi, dan Kewenangan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu	65
1. Tipologi Pengawasan Pemilu	65
2. Pemilu 1955 Tanpa Pengawas Pemilu	67
3. Pengawas Pemilu pada Pemilu Orde Baru (1971-1997)	72
4. Pengawas Pemilu pada Pemilu Pasca Orde Baru (1999-2019)	79
B. Pengaturan Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Pengawas Pemilu	163
1. Tugas dan Wewenang Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	163
2. Tugas dan Wewenang Bawaslu Provinsi dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	164
3. Tugas dan Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	165

BAB 4 SUBJEK DAN OBJEK SENGKETA PROSES PEMILU	167
A. Subjek Sengketa (<i>Subjectum Litis</i>) Proses Pemilu	167
1. Pemohon	167
2. Termohon	172
3. Pihak Terkait	173
4. Penunjukan Kuasa Hukum	174
B. Objek Sengketa (<i>Objectum Litis</i>) Proses Pemilu	176
1. Objek Sengketa	176
2. Bentuk dan Jenis Objek Sengketa	178
3. Pengecualian/Pembatasan Objek Sengketa	181
BAB 5 PROSEDUR DAN TEKNIS PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU	184
A. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu	184
1. Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	184
2. Pengajuan Permohonan dan Registrasi	186
3. Prosedur Mediasi	190
4. Prosedur Adjudikasi	199
B. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Antarpeserta Pemilu	238
1. Prinsip Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Antarpeserta Pemilu	238
2. Prosedur Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Antarpeserta Pemilu	239
BAB 6 UPAYA HUKUM	243
A. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Upaya Hukum	243
B. Upaya Hukum Melalui Koreksi Putusan di Bawaslu	247
1. Pengertian dan Kewenangan Koreksi	247
2. Dasar Penilaian, Mekanisme, dan Hasil Koreksi	251
C. Upaya Hukum Melalui Pengadilan TUN Pemilu	255
1. Subjek dan Objek Sengketa TUN Pemilu	256
2. Kewenangan Pengadilan TUN	258

187	3. Pengajuan Gugatan	258
187	4. Prosedur Penyelesaian Sengketa TUN Pemilu	260

LAMPIRAN		263
-----------------	--	------------

DAFTAR PUSTAKA		295
-----------------------	--	------------

BIODATA PENULIS		299
------------------------	--	------------

174		
176	B. Objek Sengketa (Objek Lawan) Proses Pemilu	
176	1. Objek sengketa	
178	2. Bentuk dan Jenis Objek Sengketa	
181	3. Pengawasan/Pendataan Objek Sengketa	

BAB 5 PROSEDUR DAN TEKNIK PENYELESAIAN		
184	SINGKATAN	
184	A. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan	
184	1. Tahap Awal Penyelesaian Sengketa	

184	MAJLIS ULAMA INDONESIA	
188	ULINIP	
190	1. Prosedur Mediasi	
199	2. Prosedur Arbitrase	
202	B. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Antar	
238	1. Tahap Awal Penyelesaian Sengketa	
238	2. Tahap Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	
238	3. Tahap Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	
239	4. Tahap Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	

BAB 6 UPAYA HUKUM		
243	A. Pengertian	
243	B. Upaya Hukum	
243	1. Upaya Hukum dan Kewenangan Hakim	
251	2. Upaya Hukum dan Kewenangan Hakim	
251	3. Upaya Hukum dan Kewenangan Hakim	
251	C. Upaya Hukum	
251	1. Upaya Hukum	
251	2. Upaya Hukum	

